



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TASLIM**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **15861**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.887.020.000**

1. Tanah Seluas 158 m2 di KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. Tanah Seluas 142 m2 di KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 336 m2/140 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 1.13 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah Seluas 20000 m2 di KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah Seluas 420 m2 di KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/60 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 257.020.000
8. Tanah Seluas 20000 m2 di KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 78.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000



3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1996, HASIL SENDIRI

Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 160.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 145.365.865

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 66.700.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.337.085.865

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.337.085.865

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.